

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
A. PENDAHULUAN	3
1 Tujuan <i>Training Of Trainers</i>	3
2 Pendekatan <i>Training Of Trainers</i>	3
3 Metode <i>Training Of Trainers</i>	3
4 Waktu Pembelajaran.....	4
B. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.....	5
1 Latar Belakang LHKPN.....	5
2 Sejarah Singkat LHKPN	5
3 Dasar Ketentuan LHKPN.....	5
4 Proses LHKPN	9
4.1 Pendataan Wajib LHKPN	9
4.2 Penerimaan LHKPN	9
4.3 Verifikasi LHKPN	9
4.4 Pengolahan Data LHKPN	10
4.5 Pengumuman LHKPN	10
5 Formulir LHKPN	10
5.1 Petunjuk Umum	11
5.2 Petunjuk Khusus untuk Pengisian Formulir LHKPN Format Excel.....	12
5.3 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	13
5.4 Tips Cara Mudah Mengisi Formulir LHKPN	13
C. FORMULIR LHKPN MODEL KPK-A	15
1 Tanda Terima.....	15
2 Daftar Isi.....	16
3 Halaman Identitas.....	16
4 Data Pribadi.....	17
5 Riwayat Jabatan.....	18
6 Data Keluarga.....	18
6.1 Data Isteri / Suami.....	18
6.2 Data Anak yang Masih Menjadi Tanggungan.....	19
6.3 Data Anak yang Tidak Menjadi Tanggungan	19
7 Harta Kekayaan.....	20
7.1 Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	20
7.2 Harta Bergerak.....	21

7.2.1	Alat Transportasi dan Mesin Lainnya	21
7.2.2	Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya.....	22
7.2.3	Harta Bergerak Lainnya.....	23
7.3	Surat Berharga.....	23
7.4	Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya.....	24
7.5	Piutang / Hutang.....	25
8	Ringkasan Harta Kekayaan.....	25
9	Penghasilan.....	26
9.1	Penghasilan dari Jabatan PN dan Isteri / Suami (Per bulan).....	26
9.2	Penghasilan dari Kekayaan yang Dimiliki (Per tahun).....	27
9.3	Penghasilan dari Profesi / Keahlian PN dan Isteri / Suami (Per tahun).....	27
10	Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.....	27
D.	FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B.....	32
1	Kode Perubahan pada Data Pribadi dan Keluarga	32
1.1	Data Pribadi	32
1.2	Isteri / Suami.....	33
1.3	Anak.....	34
2	Kode Perubahan pada Harta Tidak Bergerak	34
3	Kode Perubahan pada Harta Bergerak dan Surat Berharga.....	35
4	Kode Perubahan pada Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya.....	36
5	Kode Perubahan pada Piutang / Hutang.....	37
6	Kode Perubahan pada Penghasilan	38
7	Kode Perubahan pada Pengeluaran.....	39
8	Surat Pernyataan dan Surat Kuasa	39
	ALAMAT KORESPONDENSI.....	45
	CONTOH PENGUMUMAN LHKPN.....	Lampiran
	DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG LHKPN.....	Lampiran
	TANYA JAWAB PENGISIAN FORMULIR LHKPN.....	Lampiran
	TEKA TEKI SILANG LHKPN.....	Lampiran

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN TRAINING OF TRAINERS

KPK menyelenggarakan Program *Training of Trainers* LHKPN dalam rangka membekali peserta yang ditunjuk oleh instansinya untuk menguasai kompetensi teknis dalam mentransfer pengetahuan/keterampilan mengenai LHKPN kepada Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN/pihak lain di lingkungan instansi tempatnya bertugas melalui suatu proses belajar terstruktur yang intensif. Untuk itu kami merancang program pembekalan yang diharapkan setelah melewati program tersebut para peserta akan:

- Memperoleh pemahaman mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN;
- Dapat langsung mengajarkan tentang tata cara pengisian Formulir LHKPN secara baik dan benar kepada Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN/pihak lain di lingkungan instansinya;
- Dapat menjadi kepanjangan tangan KPK dalam hal pengisian Formulir LHKPN sehingga menjadi tempat bertanya terkait pengisian Formulir LHKPN di lingkungan instansinya.

2. PENDEKATAN TRAINING OF TRAINERS

Program ini menggunakan pendekatan spesifik yang diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif dengan memanfaatkan kapasitas individu peserta serta sistematika tahap pembelajaran.

Proses belajar yang digunakan adalah proses pembelajaran orang dewasa dimana diutamakan keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung, antara lain dengan: diskusi dan presentasi kelompok, *study* kasus, latihan soal dan saling berbagi pengalaman serta pengetahuan antar peserta.

3. METODE TRAINING OF TRAINERS

Program ini menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif dari peserta guna memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada para peserta serta juga untuk mempersiapkan menjadi narasumber mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

Metode tersebut meliputi:

- a) Paparan penjelasan mengenai LHKPN dan Formulir LHKPN.

Pada tahapan ini peserta diberikan pengetahuan mengenai latar belakang, sejarah, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan LHKPN dan pemahaman mengenai jenis serta tata cara pengisian Formulir LHKPN. Sistem belajar menggunakan metode presentasi oleh narasumber dari KPK.

- b) Latihan pengisian Formulir LHKPN dan *study* kasus.

Pada tahapan ini peserta diberikan contoh kasus mengenai kondisi faktual kepemilikan harta seorang Penyelenggara Negara (PN) untuk selanjutnya mengaplikasikan cara pengisiannya pada formulir LHKPN. Sistem belajar yang digunakan adalah metode kerja kelompok dengan

anggota setiap kelompok adalah 5-10 orang, setiap peserta diharapkan memiliki fungsi untuk menyelesaikan perbagian dari setiap kasus yang diberikan. Pada akhir sesi, hasil diskusi kelompok tersebut dipresentasikan kepada semua peserta dilanjutkan dengan pembahasan secara bersama-sama setiap penyelesaian kasus. Sistem belajar yang digunakan adalah diskusi aktif seluruh peserta.

4. WAKTU PEMBELAJARAN

Keseluruhan pembelajaran dilakukan dalam waktu 350 menit dengan rincian sebagai berikut:

- Pretest (20 menit);
- Pendahuluan dan Tanya Jawab (45 menit);
- Penjelasan Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B serta Tanya Jawab (125 menit);
- Diskusi dan Latihan Soal per kelompok (40 menit);
- Presentasi dari tiap kelompok (100 menit);
- Post test dan Penutupan (20 menit).

B. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

1. LATAR BELAKANG LHKPN

- Penanaman sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab;
- Pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi;
- Pendeteksian konflik kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi;
- Penyediaan sarana kontrol masyarakat;
- Penguji Integritas para Calon Penyelenggara Negara maupun Penyelenggara Negara.

2. SEJARAH SINGKAT LHKPN

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sejak tahun 1999. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan penanganan LHKPN dilakukan oleh KPK yaitu dengan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: "Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi".

3. DASAR KETENTUAN LHKPN

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Klasifikasi Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (7):

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisariss, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Kewajiban Penyelenggara Negara terkait Harta Kekayaan:

- o Pasal 5 Ayat (2)
“Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat”
 - o Pasal 5 Ayat (3)
“Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat”
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kewenangan KPK dalam menangani LHKPN tertuang dalam Pasal 13 Huruf a:
- “Dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)”**
- c) Peraturan Perundang-undangan lainnya:
- o Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- d) Keputusan Pimpinan KPK Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN

REGULASI PENDUKUNG LAINNYA UNTUK EKSEKUTIF

1. Surat Edaran MENPAN Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Surat Edaran ini berisi penegasan selain Penyelenggara Negara sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, ditetapkan pejabat-pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK. Pejabat dimaksud adalah:

- 1) Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
- 2) Kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
- 3) Pemeriksa Bea dan Cukai;
- 4) Pemeriksa Pajak;
- 5) Auditor;
- 6) Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
- 7) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
- 8) Pejabat Pembuat Regulasi.

2. Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Surat Edaran ini berisi untuk menindaklanjuti dari DIKTUM PERTAMA dan KEDUA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Pimpinan Instansi diharapkan untuk:

- 1) Mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib LHKPN;
- 2) Menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN;
- 3) Menugaskan unit pengawasan untuk memonitor penyampaian LHKPN.

3. Surat Edaran Menpan Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN.

Surat Edaran ini berisi untuk menindaklanjuti Surat Edaran MENPAN Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka setiap Pimpinan Instansi diharapkan untuk:

- 1) Mengklarifikasi data kepada KPK (cq. Direktorat PP LHKPN) apabila ada data yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh instansi;

- 2) Memberikan peringatan dan sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor: 30 tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap pegawai yang belum memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN;
 - 3) Mengeluarkan dan atau mengirimkan SK Penetapan Wajib Lapor Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan KK di lingkungan instansinya apabila belum pernah mengeluarkan dan atau mengirimkan SK tersebut kepada KPK dan Kementerian Negara PAN;
 - 4) Menyampaikan hasil tindak lanjut kegiatan angka 1 s.d. 3 di atas kepada KPK dan tembusan kepada Kementerian Negara PAN.
4. Surat Edaran MENPAN Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan. Surat Edaran ini berisi untuk mendorong peningkatan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka setiap pimpinan instansi diharapkan antara lain untuk:
- 1) Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan Eselon I atau yang setara apabila belum memenuhi unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN;
 - 2) Tidak melantik PNS yang akan diangkat dalam jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN.
5. Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:
- 1) Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN;
 - 2) Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN;
 - 3) Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;
 - 4) Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan.
- Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, diharapkan pimpinan instansi pemerintah melakukan langkah-langkah antara lain:
- 1) Mengeluarkan SK Pengelolaan LHKPN bagi instansi yang belum mengeluarkan SK tersebut;
 - 2) Mewajibkan Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyampaikan LHKPN;

- 3) Mewajibkan pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya dua bulan setelah ditetapkan/dilantik dan dua tahun setelah menduduki jabatan yang sama;
 - 4) Meninjau kembali (ditunda/dibatalkan) pengangkatan dalam jabatan apabila tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
 - 5) Menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN;
 - 6) Memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi APIP dan/atau KPK.
6. Surat Keputusan Pengelolaan LHKPN (Penetapan Wajib LHKPN dan Penunjukan Koordinator dan Administrator/User) yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi masing-masing.

4. PROSES LHKPN

Kegiatan penanganan LHKPN dapat dilihat pada alur proses sebagai berikut:

4.1 Pendataan Wajib LHKPN

Pendataan Wajib LHKPN merupakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi PN yang berkewajiban melaporkan kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Penerimaan LHKPN

Penerimaan LHKPN adalah kegiatan pencatatan dengan mengagendakan dan memberikan tanda terima kepada PN atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Pemberian tanda terima akan diberikan langsung kepada PN atau yang mewakili apabila penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung baik di kantor KPK atau instansi, atau dikirimkan melalui pos apabila penyampaian LHKPN dilakukan tidak langsung.

4.3 Verifikasi LHKPN

Verifikasi LHKPN adalah kegiatan meneliti kebenaran pengisian formulir, kelengkapan bukti pendukung/dokumen kepemilikan, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh PN sesuai petunjuk yang ditetapkan KPK. Dalam hal terdapat ketidaktepatan pengisian formulir atau ketidaklengkapan dokumen pendukung, KPK akan memberitahukan kepada Penyelenggara Negara atau yang mewakili baik secara langsung pada saat penerimaan atau melalui surat permintaan resmi.

4.4 Pengolahan Data LHKPN

Pengolahan Data LHKPN ke dalam sistem informasi KPK adalah mengolah data LHKPN ke dalam format tertentu yang dirancang oleh KPK, guna mendukung kemudahan dalam pelaksanaan pengumuman maupun untuk keperluan pemeriksaan.

4.5 Pengumuman LHKPN

Pengumuman LHKPN dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK.

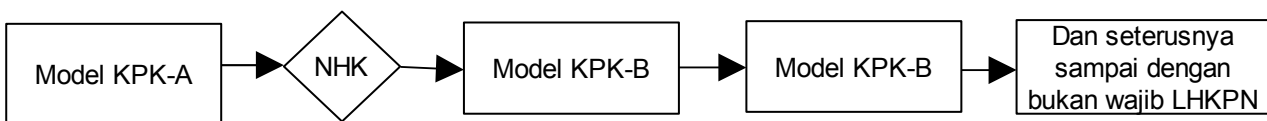
Pengumuman dilakukan di papan pengumuman pada instansi dimana PN bersangkutan bekerja selama satu bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima.

5. FORMULIR LHKPN

Formulir LHKPN terdiri dari **dua jenis**, yaitu:

- a) Formulir LHKPN **Model KPK-A**, formulir ini diisi oleh Penyelenggara Negara untuk yang pertama kali mengisi LHKPN;
- b) Formulir LHKPN **Model KPK-B**, formulir ini diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah mengisi Formulir LHKPN sebelumnya dan apabila:
 - 1) Mengalami perubahan jabatan (mutasi, promosi atau pensiun);
 - 2) Dua tahun dalam jabatan yang sama sejak tanggal pelaporan sebelumnya;
 - 3) Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

Ilustrasi penggunaan formulir:



Apabila Wajib LHKPN menginginkan informasi jenis Formulir LHKPN yang harus diisi, dapat menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK (lihat hal.45).

Formulir LHKPN tersedia dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy (file excel)*. Keduanya dapat diperoleh dengan cara:

- 1. Meminta langsung ke KPK berupa formulir cetak atau CD;
- 2. Mengunduh pada *website* KPK www.kpk.go.id;
- 3. Memperbanyak dengan memfotokopi sesuai kebutuhan.

Formulir LHKPN yang digunakan **tidak harus berupa formulir cetak asli**, oleh karena itu setiap instansi ataupun Penyelenggara Negara dapat memperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

5.1 Petunjuk Umum

1. Bacalah terlebih dahulu petunjuk teknis pengisian secara seksama sebelum mengisi formulir LHKPN;
2. Isilah formulir LHKPN ini secara JUJUR, BENAR, dan LENGKAP;
3. Apabila dalam halaman tertentu kepemilikan harta melebihi dari jumlah kolom yang tersedia pada isian formulir, silakan halaman tersebut diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dan untuk penomorannya disesuaikan dengan jumlah isian;
4. Tulislah nama, gelar, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Penulisan nama orang yang telah meninggal dunia/wafat, diberi tanda (alm) dibelakang nama yang bersangkutan dan cukup diisi nama dan umur pada saat meninggal dunia, contoh : Firman (alm) / 56 tahun;
6. Lampirkan salinan atau fotokopi surat atau tanda bukti kepemilikan harta kekayaan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen LHKPN;
7. **Harta** adalah semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Wajib LHKPN, isteri/suami, dan atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik atas nama yang bersangkutan maupun atas nama orang lain. Harta yang sudah dilepaskan kepemilikannya, meskipun masih atas nama yang bersangkutan tidak perlu dilaporkan;
8. **Hutang** adalah semua hutang yang dimiliki oleh Wajib LHKPN, isteri/suami, dan atau anak yang masih menjadi tanggungan;
9. Pelaporan harta kekayaan menggunakan mata uang Rupiah, sedangkan kekayaan dalam bentuk mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat (US\$) dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal pelaporan;
10. **Kode Jenis** : Isilah sesuai dengan nomor kode jenis yang tersedia. Khusus untuk formulir B, kode jenis perubahan : Isilah dengan melihat Daftar Jenis Perubahan;
11. **Atas Nama** : Isilah sesuai dengan nama yang tercantum dalam tanda bukti kepemilikan. **Hubungan keluarga** : Isilah nomor kode sesuai hubungan keluarga dengan PN sebagaimana disebut pada bagian bawah halaman formulir LHKPN;
12. **Asal Usul Kekayaan** : Isilah dengan nomor kode asal usul perolehan kekayaan sebagaimana disebut pada bagian bawah halaman formulir LHKPN. Untuk pilihan 2 s/d 7 harus melengkapi formulir LHKPN MODEL KPK-A halaman 23 atau KPK-B halaman 22;
13. **Tahun Perolehan** : Isilah dengan tahun perolehan harta tersebut;
14. **Nilai Perolehan** : Isilah dengan harga perolehan kekayaan tersebut;
15. **Nilai Jual saat Pelaporan** : Isilah sesuai dengan dokumen terakhir, jika belum ada gunakan taksiran nilai pasar;
16. Wajib bubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000 atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada formulir LHKPN pada halaman Surat Pernyataan dan Surat Kuasa;

17. Fotokopi formulir yang telah diisi dan disimpan sebagai arsip yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaporan berikutnya;
18. Formulir yang telah diisi dengan lengkap beserta lampiran surat atau tanda bukti kepemilikan harta kekayaan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian disampaikan/dikirimkan ke Direktorat PP LHKPN KPK;
19. Apabila ada halaman dan atau baris yang tidak terisi (kosong) silakan halaman atau baris tersebut dicoret silang/*cross*. Pada Formulir LHKPN Model KPK-B, halaman yang tidak terisi tersebut tetap harus ditandatangani.

5.2 Petunjuk Khusus untuk Pengisian Formulir LHKPN Format Excel

1. Formulir LHKPN Format excel dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam pengisian Formulir LHKPN;
2. Peringatan '*Macro*' pada saat membuka file tersebut bukanlah macro virus tapi macro yang digunakan dalam menyiapkan Formulir LHKPN Fomat Excel ini. Silakan pilih *option enable macro* pada saat membuka file excel tersebut, hal ini diperlukan agar dapat mempergunakan fitur *combo box* yang sudah dipersiapkan;
3. Dilarang mengganti isi dan format formulir tersebut, bila mengganti dengan sengaja akan dikenakan sanksi pemalsuan dokumen negara;
4. Isikan informasi yang akan diberikan pada kolom yang sudah tersedia (..... atau)
5. Untuk menambahkan halaman maka perintah yang harus dijalankan adalah :
 - 1) Pastikan berada dalam halaman (*worksheet*) yang ingin ditambahkan
 - 2) *Command : Edit>Move or Copy Sheet*
 - 3) Pada layar *Move or Copy Sheet* (lihat gambar a.), *check x Create a copy*
 - 4) Pada 'Text Box' pilih halaman dimana halaman baru akan ditempatkan.
6. Jika tidak dapat menjalankan *combo box* (kotak pilihan) maka anda harus merubah *security level* dari excel anda dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Simpan (*save*) file ke dalam *harddisk* kerja
 - 2) Buka file dari *harddisk*
 - 3) Jalankan *command : Tools > Option > Security > Macro Security*
 - 4) Pilih *Low Security Level*
 - 5) *Save file*
 - 6) *Close file*
 - 7) *Open file*

5.3 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- 1) Kesesuaian Jenis Formulir LHKPN MODEL KPK-A atau KPK-B;
- 2) Pastikan tidak menggunakan formulir lama (di bawah cetakan 2007);
- 3) Pastikan sudah mengisi posisi Per Tanggal Pelaporan: Tgl./Bln./Thn.;
- 4) Tidak mengisi secara lengkap data lokasi tanah dan bangunan;
- 5) Tidak mengisi nomor rekening;
- 6) Apabila dokumen pendukung tidak tersedia (Hilang, Rusak, Masih Dalam Proses, dll) dapat digantikan dengan surat pernyataan di atas meterai yang berisi informasi mengenai hal tersebut dan seluruh informasi lainnya yang berkaitan dengan isian formulir dan ditandatangani oleh Wajib LHKPN (cukup satu tanda tangan di atas meterai untuk beberapa item informasi yang disampaikan);
- 7) Semua harta yang dilaporkan adalah seluruh harta yang secara sah dapat diklaim milik Wajib LHKPN, isteri/suami, dan anak dalam tanggungan baik secara lisan maupun tertulis (tidak dalam sengketa).

Khusus Formulir LHKPN Model KPK-B

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian Formulir LHKPN khususnya Model KPK-B adalah sebagai berikut:

- 1) Menuliskan NHK (Nomor Harta Kekayaan);
- 2) Mengisi kode jenis perubahan;
- 3) Seringkali terjadi kesalahan apabila tidak ada perubahan harta dengan data LHKPN sebelumnya;
- 4) Melampirkan dokumen pendukung yang berubah (misal : Salinan SPPT PBB terakhir, dll);
- 5) Menandatangani setiap lembar form isian (khusus Formulir LHKPN Model KPK-B);
- 6) Penulisan item digabung pada Formulir LHKPN Model KPK-A, sedangkan perubahan pada Formulir LHKPN Model KPK-B item dipisah atau sebaliknya (kas, harta bergerak lainnya, logam mulia, dll).

5.4 Tips Cara Mudah Mengisi Formulir LHKPN

Untuk membantu mempermudah dalam pengisian Formulir LHKPN, dapat melakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Kumpulkan semua dokumen pendukung atau bukti kepemilikan, kemudian isi *check list* kelengkapan sesuai dokumen pendukung yang disertakan;
- 2) Isi formulir LHKPN secara jujur, benar dan lengkap. Yang dimaksud dengan pengisian secara jujur, benar dan lengkap adalah pengisian yang sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada dan dilakukan secara jujur apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi;
- 3) Susun dokumen pendukung sesuai dengan susunan formulir LHKPN;

- 4) LHKPN dan pendukungnya jangan dijilid atau di-*stapler*, gunakan *clip binder*, karena setiap dokumen yang disampaikan akan di-*scan* setiap lembarnya;
- 5) Fotokopi formulir dan dokumen pendukung untuk arsip, sebagai dasar dalam pengisian formulir selanjutnya.

C. FORMULIR LHKPN MODEL KPK-A

Formulir LHKPN Model KPK-A adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara untuk yang pertama kali mengisi LHKPN. Adapun muatan formulir LHKPN Model KPK-A meliputi:

1. Tanda Terima

Digunakan sebagai Tanda Bukti bahwa telah menyampaikan LHKPN kepada KPK, dimana sebelah kiri sebagai arsip KPK dan sebelah kanan sebagai arsip Wajib LHKPN.



Gambar 1. Lembar Tanda Terima Form LHKPN Model KPK-A.

2. Daftar Isi

Daftar Isi berfungsi sebagai lembar kendali (*control*) jumlah lembar halaman yang digunakan.

DAFTAR ISI		Halaman	Jumlah
PENYELENGGARA NEGARA YANG BERKEWAJIBAN MENISI FORMULIR LHKPN MODEL KPK-A		1	
DAFTAR ISI		ii	
I. DATA PRIBADI		1	
I.1. DATA PRIBADI		1	
I.2. PENYAWIT JABATAN		2	
II. DATA KELUARGA		2	
II.1. DATA ISTRI/UGAMI		3	
II.2. DATA ANAK YANG MASIH MENJADI TANGGUNGAN		4	
II.3. DATA ANAK YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN		5	
III. HARTA KEKAYAAN		6	
III.1. HARTA TETAP BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)		6	
III.2. HARTA BERGERAK		7	
III.2.1. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA		7	
III.2.2. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNGAN, PERTANAHAN, KEDUTANAN, DAN PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		8	
III.2.3. HARTA BERGERAK LAINNYA		9	
III.3. SURAT BERHARGA		10	
III.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA		11	
III.5. SUTRANG		12	
III.6. HUTANG		13	
IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA		14	
V. PENGHASILAN PENYELENGGARA NEGARA		15	
V.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER BULAN)		15	
V.2. PENGHASILAN DARI HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI (PER TAHUN)		15	
V.3. PENGHASILAN DARI DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)		15	
VI. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI PENYELENGGARA NEGARA		16	
VI.1. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI DARI PEKERJAAN (PER BULAN)		16	
VI.2. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)		16	
VII. PENGELOUARAN		17	
VIII. SURAT PERNYATAAN		18	
IX. SURAT KUASA MENYUMBUKAN HARTA KEKAYAAN		19	
X. SURAT KUASA		20	
XI. LAMPIRAN SURAT KUASA		21	
XII. SURAT KUASA PERSETUJUAN AKAH REKENING BERSAMA (JOINT ACCOUNT)		22	
XIII. SURAT PERNYATAAN TENTANG HARTA KEKAYAAN BEKAWARISAN/HAJAH		23	

Gambar 2. Lembar Daftar Isi Form LHKPN Model KPK-A.

3. Halaman Identitas

Halaman Identitas berisi informasi mengenai jabatan Wajib LHKPN.

Halaman identitas form LHKPN Model KPK-A. The form includes a photo of the official, the logo of the Commission for Eradication of Corruption (KPK), and the title 'FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA'. It contains fields for name, NIP, position, and unit. A callout box points to the position field with the text 'TGL POSISI HARTA SAAT PELAPORAN'. Another callout box points to the name field with the text 'DIISI DNG NAMA LENGKAP & GELAR'. A third callout box points to the position field with the text 'JANGAN DISINGKAT'. The form is filled out with the name 'Drs. GHASSAN RAHMANDA', NIP 'A - 551', and position 'ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009-2014' and 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI'.

Gambar 3. Lembar Identitas Form LHKPN Model KPK-A.

4. Data Pribadi

Data Pribadi berisi informasi mengenai profil Wajib LHKPN. Perlu menjadi perhatian dalam pencantuman alamat rumah adalah alamat tempat tinggal PN saat ini (tidak harus rumah pribadi dan tidak harus sesuai alamat pada KTP), misalnya: rumah dinas, rumah kost, dan lain-lain.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 1 dari 23

I. DATA PRIBADI
I.1. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : DRS. GHASSAN RAHMANDA

2. Nomor KTP : 32.03.16.2009/1274/2844053

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

4. Tempat/Tgl. Lahir : MATARAM / 16-08-1963
Tgl. Bin. Ttn

5. Pendidikan Tertinggi : SD SLTP SLTA SMD 3 S1/D4 S2/SP1 S3/SP2

6. Agama : Islam Kristen Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya :

7. Status Perkawinan : Kawin Tidak Kawin Janda/Duda

8. NPWP : 24.005.583.0-413.000

9. Alamat Pekerjaan
Jalan : JL. JEND. GATOT SUBROTO Nomor : 6
Kabupaten/Kota : JAKARTA PUSAT Propinsi : DKI JAKARTA
No. Telepon : 021- 5715741 Negara : INDONESIA Kode Pos : 102710
No. Fax : 021- 5715741 Email : ghassan@dpr.go.id

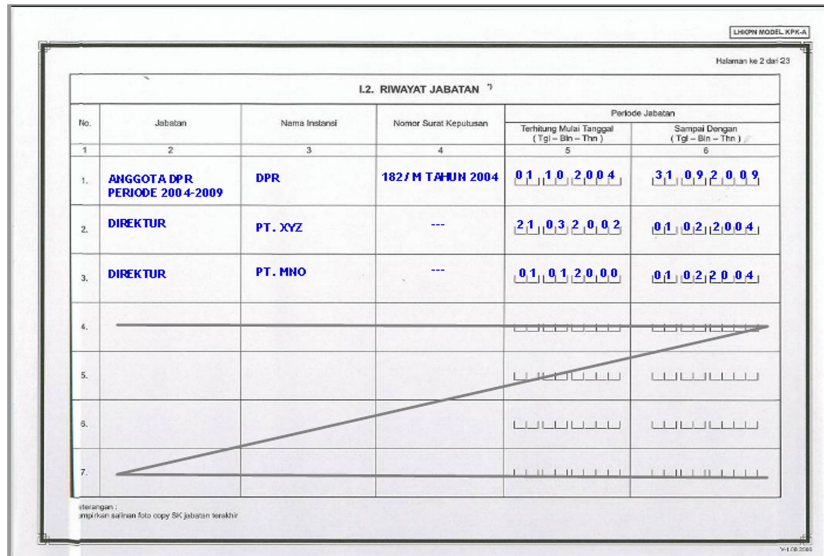
10. Alamat Rumah
Jalan : RT/RW :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Propinsi :
No. Telepon : Negara : Kode Pos :
No. HP : MOHON DIISI UNTUK KONFIRMASI Email :
No. Faks :

Keterangan : 1. Nama tidak dibalik & diurutkan gelar.
2. Ditampilkan salinan foto copy KTP.
3. Ditampilkan salinan foto copy NPWP. * Corel yang tidak perlu

Gambar 4. Lembar Data Pribadi Form LHKPN Model KPK-A

5. Riwayat Jabatan

Riwayat Jabatan berisi informasi urutan jabatan yang pernah dijabat oleh Wajib LHKPN. Jabatan yang diisikan pada halaman ini cukup tiga jabatan terakhir dan melampirkan salinan/copy Surat Keputusan pengangkatan pada jabatan terakhir.



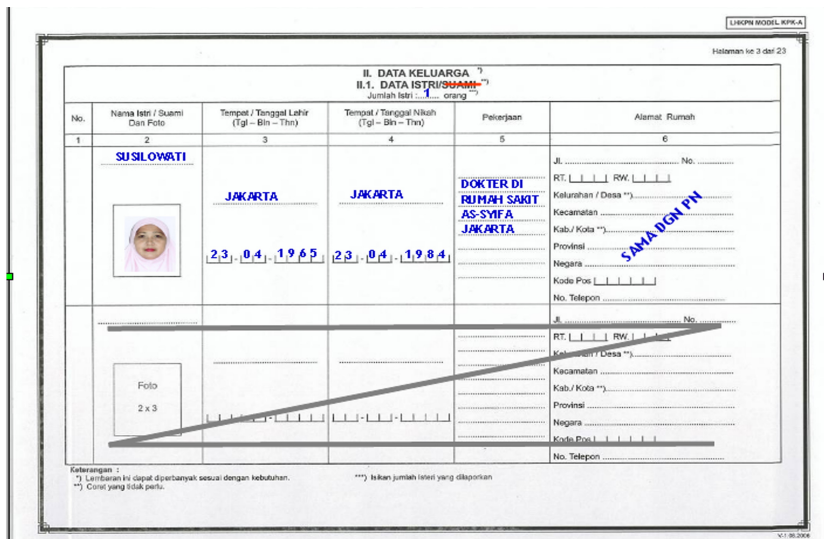
No.	Jabatan	Nama Instansi	Nomor Surat Keputusan	Periode Jabatan	
				Terhitung Mulai Tanggal (Tgl - Bln - Thn)	Sampai Dengan (Tgl - Bln - Thn)
1.	ANGGOTA DPR PERIODE 2004-2009	DPR	182 / M TAHUN 2004	01 10 2004	31 09 2009
2.	DIREKTUR	PT. XYZ	---	21 03 2002	01 02 2004
3.	DIREKTUR	PT. MNO	---	01 01 2000	01 02 2004
4.					
5.					
6.					
7.					


Gambar 5. Lembar Riwayat Jabatan Form LHKPN Model KPK-A.

6. Data Keluarga

6.1 Data Istri/Suami

Data Istri/Suami berisi informasi mengenai profil istri/suami Wajib LHKPN.



No.	Nama Istri / Suami Dan Foto	Tempat / Tanggal Lahir (Tgl - Bln - Thn)	Tempat / Tanggal Nikah (Tgl - Bln - Thn)	Pekerjaan	Alamat Rumah
1	SUSILOWATI 	JAKARTA 23 04 1965	JAKARTA 23 04 1984	DOKTER DI RUMAH SAKIT AS-SYIFA JAKARTA	Jl. No. RT. RW. Kecamatan / Desa *** Kecamatan ... Kab / Kota *** Provinsi ... Negara ... Kode Pos ... No. Telepon ...
	Foto 2 x 3				

Gambar 6. Lembar Data Keluarga (istri/suami) Form LHKPN Model KPK-A.

6.2 Data Anak yang Masih Menjadi Tanggungan

- Data Anak yang Masih Menjadi Tanggungan berisi informasi mengenai profil anak yang masih menjadi tanggungan Wajib LHKPN (belum mandiri secara finansial)
- Anak yang masih menjadi tanggungan, mencakup seluruh anak yang biaya hidupnya masih ditanggung oleh Wajib LHKPN, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat.

No	Nama Anak / Jenis Kelamin / Status	Tempat / Tanggal Lahir (Tgl - Bln - Tm)	Nama dan Alamat Sekolah / Pangunan Tinggi	Alamat Rumah
1	HOUVAL Pris / "Wanita" / Kandung / "Tersempul"	BANDUNG 10 - 07 - 1994	SMU PONDOK GEDE BEKASI	Jl. No. RT. RW. Kecamatan / Desa *** Kab./ Kota *** Provinsi Negara Kode Pos No. Telepon
2	KHALISHAH Rach / "Wanita" / Kandung / "Tersempul"	JAKARTA 25 - 07 - 2006	Z	Jl. No. RT. RW. Kecamatan / Desa *** Kab./ Kota *** Provinsi Negara Kode Pos No. Telepon

Gambar 7. Lembar Data Anak yang Masih Menjadi Tanggungan Form LHKPN Model KPK-A.

6.3 Data Anak yang Tidak Menjadi Tanggungan

- Data Anak yang Tidak Menjadi Tanggungan berisi informasi mengenai profil anak yang tidak menjadi tanggungan Wajib LHKPN (sudah mandiri secara finansial).
- Anak yang tidak menjadi tanggungan, mencakup seluruh anak yang biaya hidupnya tidak lagi ditanggung oleh Wajib LHKPN, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Untuk anak yang tidak menjadi tanggungan, hanya data ini yang dilaporkan, sedangkan harta kekayaannya tidak perlu dilaporkan.

II.3 DATA ANAK YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN
Jumlah : 1 orang


No	Nama Anak / Jenis Kelamin / Status	Tempat / Tanggal Lahir (Tgl - Bln - Thn)	Pekerjaan dan Alamat Kantor	Alamat Rumah
1	HEDY PRASETYA  Pria / <input checked="" type="checkbox"/> Wanita (*) Kandung / <input checked="" type="checkbox"/> Tiri / Adopsi (**)	BAIDUNG 3, 0 - 0 1 - 1 9, 8, 5	PEGAWAI PT AGUNG MULIA JL KELAPA SAWIT JAKARTA TIMUR	Jl. FLAMB OYAH No. RT. 0 1 0 RW. 0 0 5 Kecamatan / Desa *** REMP OA Kecamatan CIPUTAT Kab./ Kota TANGERANG SELATAN Provinsi BAHTEH Negara INDONESIA Kode Pos 1 8 7 2 0 No. Telepon 021 735644

Foto 2 x 3
Pria / **Wanita** (***)
Kandung / **Tiri / Adopsi** (***)

*) Perempuan
**) Selain itu dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
***) Coret yang tidak perlu.

Gambar 8. Lembar Data Anak yang Tidak Menjadi Tanggungan Form LHKPN Model KPK-A.

7. Harta Kekayaan

Harta kekayaan yang dilaporkan dalam Formulir LHKPN meliputi:

7.1 Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

- Pengertian Harta Tidak Bergerak yang dimaksud dalam formulir ini adalah suatu benda yang karena sifat, tujuan atau karena ditentukan oleh undang-undang sebagai benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.
- Termasuk dalam kelompok ini adalah tanah dan atau bangunan yang dimiliki, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

III. HARTA KEKAYAAN							
III.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)							
No.	Letak / Alamat	Luas Tanah / Luas Bangunan / No. Surat Tanah	Ases Nama / Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Saat Pelaporan (Nilai / Luas Tanah / Bangunan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jalan DESA JARIT RT/RW 010102 / 010109 Kel./Desa JARIT Kab./Kota CANDIPURO Provinsi JAWA TIMUR Negara INDONESIA Kode Pos 6173173	Tanah T = 6408 (m ²) Bangunan B = (m ²) No. Surat Tanah SHM 337	SITI SHOLIKHAH 4	3	Dari 13191 s.d Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp. 89.712.000 6408 M² x Rp. 14.000 272 M² x Rp. 2.176.000
2	Jalan DAKSIAPATI TIMUR RT/RW 01018 / 01014 Kel./Desa RAWAMANGUN Kab./Kota JAWA BARU Provinsi SUMATERA UTARA Negara INDONESIA Kode Pos 1132210	Tanah T = 272 (m ²) Bangunan B = 254 (m ²) No. Surat Tanah SHM 02163	SUSILOWATI 2 SUSILOWATI 2	1 1	Dari 2006 s.d Rp. 578.986.000	Rp. Rp. Rp.	Rp. 591.872.000 254 M² x Rp. 595.000 Rp. 151.130.000
Sub Total / Total:						Rp. 632.714.000	

Gambar 9. Lembar Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Form LHKPN Model KPK-A.

7.2 Harta Bergerak

Pengertian Harta Bergerak yang dimaksud dalam formulir ini adalah suatu benda yang karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang sebagai benda bergerak.

7.2.1 Alat Transportasi dan Mesin Lainnya

Pengertian Alat Transportasi dan Mesin Lainnya yang dimaksud dalam formulir ini adalah setiap jenis alat transportasi dan mesin lainnya yang dimiliki, baik untuk keperluan pribadi, untuk keperluan usaha perseorangan/tidak berbentuk badan hukum namun tidak sebagai barang dagangan.

III.2. HARTA BERGERAK Halaman ke 7 dari 23

III.2.1. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

No.	Kode Jenis ¹⁾	Kode Jenis ¹⁾		No. Polid / Merek / Model / Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Saat Pelaporan
		1. Kapal Laut	2. Pesawat Udara				
1	3	DRS GHASSAN R	1	B 4 GUS / TOYOTA / ALPHARD (DANTI) 2 0 0 8	2 0 0 8	Rp. 1.100.000.000	Rp. 800.000.000
2	3	SUSILOWATI	1	B 14 A SA / TOYOTA / INNOVA (DANTI) 2 0 0 9	2 0 0 9	Rp. 215.800.000	Rp. 210.800.000
3	5	DRS GHASSAN R	1	KAWASAKI / JETSKI 2 0 0 9	2 0 0 9	Rp. 140.000.000	Rp. 120.000.000
Sub-Total / Total						Rp. 1.130.800.000	

ICatatan :

1 - Lengkapi dengan foto copy surat bukti kepemilikan (SPM dan STNK)
2 - Lengkapi ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Hubungan Keluarga dengan penyelenggara Negara:

1. Yang bersangkutan
 2. Istri / Suami
 3. Anak
 4. Lainnya.

Asal usul Kekayaan:

1. Hasil Sendiri
 2. Warisan
 3. Hibah
 4. Hasil Sendiri dan Warisan
 5. Hasil Sendiri dan Hibah
 6. Warisan dan Hibah
 7. Hasil Sendiri, Warisan dan Hibah

Gambar 10. Lembar Alat Transportasi dan Mesin Lainnya Form LHKPN Model KPK-A.

7.2.2 Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya

Pengertian Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya yang dimaksud dalam formulir ini adalah usaha yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, isteri/suami, dan atau anak yang masih menjadi tanggungan yang tidak berbentuk badan hukum.

III.2.2. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Halaman ke 8 dari 23

No.	Kode Jenis ¹⁾	Nama Jenis	Status Lahan / Tempat usaha ²⁾	Lokasi / Negara	Alat Nama / Hubungan Keluarga ³⁾	Asal Usul Kekayaan	Jumlah / Satuan	Tahun Perolehan	Nilai Saat Pelaporan
1	1	SAPI PERAH	MLIK	INDONESIA	SUSILOWATI	1	100 dari EKOR	2 0 0 5	Rp. 500.000.000
2	1	SAPI PERAH	MLIK	INDONESIA	SUSILOWATI	1	100 dari LT SUSU	2 0 0 5	Rp. 500.000
3	7	BUTIK	SEWA	INDONESIA	SUSILOWATI	1	1 dari	2 0 0 0	Rp. 150.000.000
4	4	GABAH	MLIK	INDONESIA	SUSILOWATI	1	2 dari TOH	1 9 9 1	Rp. 20.000.000
Sub-Total / Total									Rp. 670.500.000

ICatatan :

1 - Lengkapi dengan foto copy surat bukti kepemilikan (Lembaran ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan).

Status Lahan :

MLIK
 Sewa
 Gampeng
 Lainnya

Hubungan Keluarga dengan penyelenggara Negara:

1. Yang bersangkutan
 2. Istri / Suami
 3. Anak
 4. Lainnya.

Asal usul Kekayaan:

1. Hasil Sendiri
 2. Warisan
 3. Hibah
 4. Hasil Sendiri dan Warisan
 5. Hasil Sendiri dan Hibah
 6. Warisan dan Hibah
 7. Hasil Sendiri, Warisan dan Hibah

Perhitungan berdasarkan hasil panen

Gambar 11. Lembar Peternakan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya Form LHKPN Model KPK-A.

7.2.3 Harta Bergerak Lainnya

Pengertian Harta Bergerak Lainnya yang dimaksud dalam formulir ini adalah seluruh jenis benda bergerak lainnya yang dimiliki, yang berupa:

- Logam Mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya);
- Batu Mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya);
- Barang-barang Seni dan Antik;
- Benda Bergerak lainnya (mencakup semua benda bergerak lainnya yang dimiliki antara lain peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, alat musik/olah raga, dll.).

No	Kode Jenis	Nama Barang	Asal Nama / Hubungan Keluarga	Asal Usul Kelengkapan	Jumlah / Satuan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Jual Saat Pelaporan
1	1.2	PERHIASAN (5 UNIT)	SUSILOWATI	4	100 GRAM	2009	Rp. 7.500.000	Rp. 25.000.000
2	4.1	PERABOTAN RUMAH TANGGA	SUSILOWATI	1	2 SET	2012	Rp. 215.000.000	Rp. 150.000.000
3	4.2	BARANG ELEKTRONIK	SUSILOWATI	1	10 UNIT	2012	Rp. 20.000.000	Rp. 15.000.000
Sub Total / Total								Rp. 190.000.000

Gambar 12. Lembar Harta Bergerak Lainnya Form LHKPN Model KPK-A.

7.3 Surat Berharga

Pengertian Surat Berharga yang dimaksud dalam formulir ini adalah semua obligasi, saham, penyertaan modal bukan dalam bentuk saham, dan bentuk surat berharga lainnya seperti: Reksadana, Future, Opsi, dll.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 10 dari 23

III.3. SURAT BERHARGA
Kode Jenis¹⁾ : 1. Obligasi 2. Saham 3. Surat Berharga Lainnya

No.	Kode Jenis ¹⁾	Lokasi Penyimpanan		Atas Nama / Hubungan Keluarga ²⁾	Asal Usul Kekayaan ³⁾	Tahun Investasi	Jumlah Lembar / % Kepemilikan	Nama Perusahaan / Custodian	No. Kode Penempatan	Nilai Saat Pelaporan ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	INDONESIA	2	DRS GHASSAH R 1	1	Dan 2 0 0 3 2 0 1 0	100.000 LBR	TLKM	100297	Rp. 850.000.000 US \$
2	3	INDONESIA	2	DRS GHASSAH R 1	1	Dan 2 0 0 7 2 0 1 0	27.522.5822 UNIT	HSBC REKSADANA	60-002146-008	Rp. 39.014.912 US \$
3	1	INDONESIA	2	DRS GHASSAH R 1	1	Dan 2 0 0 7 2 0 1 0	100 UNIT	PT MANDIRI SEKURITAS (OR002)	CC001-B001 00125	Rp. 100.000.000 US \$
4	2	INDONESIA	2	DRS GHASSAH R 1	1	Dan 2 0 0 3 2 0 1 0	50 %	PT XYZ		Rp. 2.500.000.000 US \$
SUBTOTAL / Total										Rp. 3.489.014.912 US \$

Keterangan:
1. Lampirkan salinan foto copy surat bukti kepemilikan surat berharga (Atas pendirian / perubahan).
2. Laminasi ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Tempat Penyimpanan:
1. Rumah
2. Bank/Deposit Box
3. Lainnya
4. Hubungan keluarga dengan Penyelenggara Negara:
1. Yang bersangkutan
2. Istri/Suami
3. Anak
4. Lainnya
5. Asal usul kekayaan:
1. Hasil Sendiri
2. Warisan
3. Hibah
4. Hasil Sendiri dan Warisan
5. Hasil Sendiri dan Hibah
6. Warisan dan Hibah
7. Hasil Sendiri, Warisan dan Hibah
6. Isilah salah satu (Rp. / US \$)

*11.08.2009

Gambar 13. Lembar Surat Berharga Form LHKPN Model KPK-A.

7.4 Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya

Pengertian Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya yang dimaksud dalam formulir ini adalah seluruh uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya seperti asuransi dengan nilai likuiditas tinggi (unit link, investasi, dll) yang dimiliki.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 11 dari 23

III.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA
Kode Jenis¹⁾ : 1. Uang Tunai 2. Deposito 3. Giro 4. Tabungan 5. Setara Kas Lainnya

No.	Kode Jenis ¹⁾	Lokasi Penyimpanan		Atas Nama / Hubungan Keluarga ²⁾	Asal Usul Kekayaan ³⁾	Nama Bank / Lembaga penyimpanan	Tahun Buka Rekening	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INDONESIA	1	GHASSAH R 1	1	Rp. 111.500.000 US \$ 21.000
2	4	INDONESIA	2	GHASSAH R 1	1	PERMATA	1 9 9 0	3.2345.X00C	Rp. 74.889.311 US \$
3	2	INDONESIA	2	SUSLOWATI 2	1	ENI	1 9 9 5	0018078X00C	Rp. 1.000.000.000 US \$
4	4	INDONESIA	2	SUSLOWATI 2	1	ENI	1 9 9 5	0018088X00C	Rp. 45.110.689 US \$
Sub Total / #total									Rp. 1.231.500.000 US \$ 21.000

Keterangan:
1. Lampirkan salinan foto copy surat bukti kepemilikan rekening bank/deposito giro dan buku tabungan.
2. Laminasi ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
3. Tempat Penyimpanan:
1. Rumah
2. Bank/Deposit Box
3. Lainnya
4. Hubungan keluarga dengan Penyelenggara Negara:
1. Yang bersangkutan
2. Istri/Suami
3. Anak
4. Lainnya
5. Asal usul kekayaan:
1. Hasil Sendiri
2. Warisan
3. Hibah
4. Hasil Sendiri dan Warisan
5. Hasil Sendiri dan Hibah
6. Warisan dan Hibah
7. Hasil Sendiri, Warisan dan Hibah
6. Isilah salah satu (Rp. / US \$)

*11.08.2009

Gambar 14. Lembar Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Lainnya Form LHKPN Model KPK-A.

7.5 Piutang/Hutang

Pengertian Piutang/Hutang yang dimaksud dalam formulir ini seluruh piutang termasuk asuransi yang mempunyai jangka waktu tertentu (seperti : Jamsostek, THT, Dana Pensiun, dll) dan hutang.

III.6. HUTANG						
No.	Nama Kreditor	Bentuk Hutang ¹⁾	Tanggal Transaksi (Tgl - Bln - Thn)	Tanggal Jatuh Tempo (Tgl - Bln - Thn)	Bentuk Agunan yang Dijawinkan / No. Kartu Kredit	Nilai Hutang dan Pelaporan ²⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	PT WAHANA CIPTA SEJAHTERA	1)	1 1 0 8 2 0 0 9	1 8 1 0 2 0 1 0	APARTEMEN KALIBATA RESIDENCE	Rp. 123.420.000 US \$
2	BCA	2)		2 9 1 1 2 0 0 9	3215433654734X000	Rp. 12.500.000 US \$
Subtotal / Total						Rp. 135.920.000 US \$

Keterangan:
1. Lampirkan salinan foto copy surat bukti hutang.
2. Lemberan ini dapat dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan.

¹⁾ Bentuk Hutang:
1. Uang
2. Kartu Kredit
3. Barang

²⁾ Nilai salah satu (Rp. / US \$)

Gambar 15. Lembar Hutang Form LHKPN Model KPK-A.

8. Ringkasan Harta Kekayaan

Ringkasan Harta Kekayaan merupakan total harta yang dimiliki oleh Wajib LHKPN sesuai dengan isian pada Formulir LHKPN. Total harta kekayaan diperoleh dengan menjumlahkan subtotal harta dikurangi dengan hutang.

IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN		
Posisi Per Tanggal: 30-11-2009		
NO/MC/R	NAMA HARTA KEKAYAAN	TOTAL HARTA (Rp. / US \$)
1	2	3
III.1.	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 1.436.134.000 US \$
III.2.	HARTA BERGERAK	Rp. 2.193.300.000 US \$
III.3.	SURAT BERHARGA	Rp. 3.489.014.912 US \$
III.4.	UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 1.234.815.991,48 US \$ 21.000
III.5.	PIUTANG	Rp. 3.000.000 US \$
SUB TOTAL HARTA		Rp. 8.356.264.903,48 US \$ 21.000
III.6.	HUTANG (-)	Rp. 135.920.000 US \$
TOTAL HARTA KEKAYAAN		Rp. 8.220.344.903,48 US \$ 21.000

Merupakan penjumlahan dari poin III.2.1 + III.2.2 + III.2.3

Gambar 16. Lembar Ringkasan Harta Kekayaan Form LHKPN Model KPK-A.

9. Penghasilan

Pengertian Penghasilan yang dimaksud dalam formulir ini adalah semua pendapatan yang diperoleh Penyelenggara Negara dan isteri/suami baik dari jabatan, kekayaan yang dimiliki ataupun profesi/keahlian.

9.1 Penghasilan dari Jabatan Penyelenggara Negara dan Isteri / Suami (Per Bulan)

Pengertian penghasilan dari jabatan yang dimaksud dalam formulir ini adalah semua penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan jabatan Penyelenggara Negara dan isteri/suami dihitung rata-rata per bulan pada tahun terakhir posisi pelaporan. (Gambar 17.1)

V. PENGHASILAN PENYELENGGARA NEGARA
Halaman ke 15 dari 23

V.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER BULAN)

No.	Nama Lembaga / Perusahaan	Gaji	Tunjangan Jabatan	Honorarium / Tunjangan Lain	Potongan-potongan	Penghasilan Bersih
1	2	3	4	5	6	7 = (3 + 4 + 5) - (6)
1	DPR RI	Rp. 18.800.000	Rp. 32.500.000	Rp. 3.008.706		Rp. 48.291.294
2	MPR RI	Rp. 12.500.000	Rp. 15.000.000			Rp. 27.500.000
Total						Rp. 75.791.294

V.2. PENGHASILAN DARI KEKAYAAN YANG DIMILIKI (PER TAHUN)

Jenis Penghasilan¹⁾: 1. Sewa 2. Bunga bank 3. Bunga Obligasi 4. Dividen 5. Jasa Gie 6. Sisa Berbagi Lainnya 7. Hasil Pemasaran/Produksi 8. Penghasilan lainnya

No.	Jenis Penghasilan ¹⁾	Nama Hasil Kekayaan Yang Membentuk Penghasilan (M. 1. s.d III.5.)	Nama Perusahaan / Badan Hukum / Perorangan	Total Penghasilan Bersih
1	2	3	4	5
1	4	1. SURAT BERTAGAS	1. SAHAM	Rp. 162.000.000
2	8	1. BUTIK	1. BUTIK PESOWA	Rp. 50.000.000
3	7	1. SISI SAPI	1. PERORANGAN	Rp. 75.000.000
Total				Rp. 287.000.000

V.3. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)

Jenis Penghasilan¹⁾: 1. Jasa Profesi 2. Keahlian lainnya 3. Penulisan dan Jabatan Lain

No.	Jenis Penghasilan ¹⁾	Nama Perusahaan / Badan Hukum / Perorangan	Total Penghasilan Bersih
1	2	3	4
1	1	1. UNIVERSITAS TRI SULA	Rp. 10.000.000
Total			Rp. 10.000.000

Keterangan:
¹⁾ Lengkapi ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.
³⁾ Penghasilan dalam mata uang asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah (Rp.).

Gambar 17.1. Lembar Penghasilan Penyelenggara Negara Form LHKPN Model KPK-A.

VI. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI PENYELENGGARA NEGARA
Halaman ke 16 dari 23

VI.1. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI DARI PEKERJAAN (PER BULAN)

No.	Nama Lembaga / Perusahaan	Gaji	Tunjangan Jabatan	Honorarium / Tunjangan Lain	Potongan-potongan	Penghasilan Bersih
1	2	3	4	5	6	7 = (3 + 4 + 5) - (6)
1	RUMAH SAKIT AS-SMFA	Rp. 10.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000		Rp. 12.000.000
Total						Rp. 42.000.000

VI.2. PENGHASILAN ISTRI / SUAMI DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)

Jenis Penghasilan¹⁾: 1. Jasa Profesi 2. Keahlian lainnya 3. Penulisan dan Jabatan Lain

No.	Jenis Penghasilan ¹⁾	Nama Perusahaan / Badan Hukum / Perorangan	Total Penghasilan Bersih
1	2	3	4
1	1	1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	Rp. 40.000.000
Total			Rp. 40.000.000

Keterangan:
¹⁾ Lengkapi ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
²⁾ Coret yang tidak perlu.
³⁾ Penghasilan dalam mata uang asing dikonversikan kedalam mata uang Rupiah (Rp.).

Gambar 17.2. Lembar Penghasilan isteri/suami Form LHKPN Model KPK-A.

9.2 Penghasilan dari Kekayaan yang Dimiliki (Per Tahun)

Pengertian Penghasilan dari Kekayaan yang Dimiliki dalam formulir ini adalah semua penghasilan yang diperoleh dari kekayaan yang dimiliki selama satu tahun terakhir. (Gambar 17.1)

9.3 Penghasilan dari Profesi / Keahlian Penyelenggara Negara dan Isteri / Suami (Per Tahun)

Pengertian Penghasilan dari Profesi/Keahlian dalam formulir ini adalah seluruh penghasilan yang diperoleh karena keahliannya (diluar penghasilan dari jabatan Penyelenggara Negara).

- Contoh Profesi : broker/pialang, dokter, pengacara, dosen, akuntan, konsultan, penceramah agama, dll.
- Contoh Keahlian : pelukis, seniman, penerjemah, pencipta lagu, dll. (Gambar 17.2)

10. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa

Pada Formulir LHKPN terdapat halaman yang harus ditandatangani di atas meterai oleh Penyelenggara Negara, meliputi:

- Surat Pernyataan berisi pernyataan kebenaran informasi yang diberikan oleh Wajib LHKPN terhadap isian Formulir LHKPN.

VIII. SURAT PERNYATAAN *)


Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. GHASSAN RAHMANDA**
 Tempat/tgl. Lahir : **MATARAM, 16/08/1963**
 Pekerjaan : **ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009 - 2014**
 No. KTP/Passport : **32.03.16.2009/127428.44053**
 NPWP : **24.005.983.0-415.000**
 Alamat : **JL.DAKSINPATI TIMUR JAKARTA TIMUR 13220**

Menyatakan bahwa :

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya sesuai dengan kewajiban dan keadaan saya sebagai Calon Penyelenggara Negara / Penyelenggara Negara / Mantan Penyelenggara Negara **), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, demi tanggung jawab moral sebagai Calon Penyelenggara Negara / Penyelenggara Negara / Mantan Penyelenggara Negara **), dengan ini saya menyatakan:
 - a. Bersedia untuk tidak disalahkan / tidak dipidai atau diberhentikan sebagai Calon Penyelenggara Negara / Penyelenggara Negara **);
 - b. Bersedia menghadapi tuntutan / gugatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan / atau peraturan lain yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Jakarta, **30 Oktober 2009**
 Yang Menyatakan,

Ghassan Rahminda
 110035860

*) Lemberan ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah
 **) Coret yang tidak perlu

Gambar 18. Lembar Surat Pernyataan LHKPN Form LHKPN Model KPK-A.

- Surat Kuasa Mengumumkan berisi pemberian kuasa dari Wajib LHKPN kepada KPK untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 10 dari 22

**VIII. SURAT KUASA
MENGUMUMKAN HARTA KEKAYAAN *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Drs. GHASSAN RAHMANDA**

Tempat/tgl lahir : **MATARAM, 16/08/1963**

Jabatan : **ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009 - 2014**

Nomor KTP/Passport : **32.03.16.2009/1274/2844053**

NPWP : **24.005.583.0-413.000**

Alamat : **JL.DAKSINAPATI TIMUR JAKARTA TIMUR 13220**

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Ir. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")


K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Selubangan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan atau menghubungi Instansi-instansi Pemerintah dan atau Pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila untuk perbuatan tersebut memerlukan kuasa khusus, hal ini dianggap telah tercantum di dalamnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa menanggal kuasa atau berada di bawah pengampuan atau telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.

Jakarta, 30 November 2009
Pemberi Kuasa,


Ghassan Rahmanda
110035860

*) Lengkapnya ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Revisi surat kuasa ini tidak dapat dibuat
**) Coret yang tidak perlu

Gambar 19. Lembar Surat Kuasa Mengumumkan Form LHKPN Model KPK-A.

- Surat Kuasa dan Lampiran Surat Kuasa berisi pemberian kuasa dari Penyelenggara Negara, isteri/suami dan anak dalam tanggungan kepada KPK. Lampiran Surat Kuasa merupakan satu kesatuan dengan Surat Kuasa.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 20 dari 22

IX. SURAT KUASA *)

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama : **Drs. GHASSAN RAHMANDA**

Tempat/tgl lahir : **MATARAM, 16/08/1963**

Pekerjaan : **ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009 - 2014**

Nomor KTP/Passport : **32.03.16.2009/1274/2844053**

NPWP : **24.005.583.0-413.000**

Alamat : **JL.DAKSINAPATI TIMUR JAKARTA TIMUR 13220**

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Ir. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

a. Mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada

keberadaan dan kebenaran data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada

- lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

- lembaga/pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;

- badan usaha dan atau perusahaan

b. Mengetahui dan mendapatkan laporan setiap akhir tahun, termasuk namun tidak terbatas pada

data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada

- lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;


- lembaga/pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;

- badan usaha dan atau perusahaan

Selubangan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila untuk perbuatan tersebut memerlukan kuasa khusus, hal ini dianggap telah tercantum di dalamnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa menanggal kuasa atau berada di bawah pengampuan atau telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.

Jakarta, 30 November 2009
Pemberi Kuasa,


Ghassan Rahmanda
110035860

*) Lengkapnya ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Revisi surat kuasa ini tidak dapat dibuat
**) Coret yang tidak perlu

Gambar 20.1. Lembar Surat Kuasa Form LHKPN Model KPK-A a.n. PN.

Lampiran Surat Kuasa
Halaman ke 22 dari 23

XI. LAMPIRAN SURAT KUASA *)

NO.	NAMA BANK / LEMBAGA NON BANK / LAIN-LAIN	NO REKREKING / NO SALAM / NO POLIS ASURANSI / LAIN-LAIN	KETERANGAN
1	PERMATA BANK	3.2345.423	
2	HSBC REKSADANA	050-002146-222	
3	MANDIRI SEKURITAS PT.	CC001-B001-003-33	
4	BANK NIAGA	080-01-23535-44-4	

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Kuasa tertera di atas.

Jakarta, 30 November 2009.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Ghasan Raimonda
140035 860

*) Form Lampiran Surat Kuasa dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan

Gambar 20.2. Lembar Lampiran Surat Kuasa Bank Form LHKPN Model KPK-A a.n. PN.

Halaman ke 20 dari 22

IX. SURAT KUASA *)

Yang bertanda-tanda di bawah ini:

Nama: **SUSILOWATI**
 Tempat/tgl lahir: **SELONG, 23/04/1965**
 Pekerjaan: **DOKTER BIMAH SAKIT AS-SMFA JAKARTA**
 Nomor KTP/Passport: **32.23.04.19.653127402847509**
 NPWP: **24.088.583.0-677.000**
 Alamat: **JL. DAKSINAPATI TIMUR JAKARTA TIMUR 13220**

UNTUK ANAK YANG TELAH MEMILIKI KTP DAN MASIH DALAM TANGGUPAN SERTA MEMILIKI REKREKING YANG MENGENSI LEMBAR SURAT KUASA

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

K H U S U S

Urut dan atas nama Pemberi Kuasa :-

a. Mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada :-
 keberadaan dan kebenaran data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :-
 - lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank,
 - lembaga publik/profesi yang terkait dengan efek, asuransi, penerintah,
 - badan usaha dan/atau perusahaan

b. Mengetahui dan mendapatkan laporan setiap akhir tahun, termasuk namun tidak terbatas pada :-
 data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :-
 - lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank,
 - lembaga publik/profesi yang terkait dengan efek, asuransi, penerintah,
 - badan usaha dan/atau perusahaan

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotokopi) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila untuk perbuatan hukum tertentu memerlukan kuasa khusus, hal ini dianggap telah tercakup di dalamnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa menugaskan di atas atau berada di bawah pengampunan atau telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.

Jakarta, 30 November 2009
Pemberi Kuasa
SUSILOWATI

*) Lembaran ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Reklasi atau kuasa ini tidak dapat diubah
 **) Coes yang tidak perlu


Gambar 20.3. Lembar Surat Kuasa Bank Form LHKPN Model KPK-A a.n. Isteri.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 21 dari 23

XI. LAMPIRAN SURAT KUASA *)

NO.	NAMA BANK / LEMBAGA NON BANK / LAIN-LAIN	NO REKENING / NO SAHAM / NO POLIS ASURANSI / LAIN-LAIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BNI	0018088000	
2	BNI	0018078111	

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Kuasa tertanggal

Jakarta, 30 Nopember 2009

 S O S I L O W A R T I

*) From Lampiran Surat Kuasa dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 20.. Lembar Lampiran Surat Kuasa Bank Form LHKPN Model KPK-A a.n. Isteri.

- Surat Persetujuan atas Rekening Bersama berisi persetujuan dari pihak yang memiliki rekening bersama dengan Penyelenggara Negara.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 22 dari 23

XII. SURAT PERSetujuan ATAS REKENING BERSAMA (JOINT ACCOUNT *)

Yang bertanda-tangan di bawah ini :.....

Nama **) : Amir Syarif
 Tempat/tgl lahir : Jakarta, 7 April 1949
 Pekerjaan : Penstunan TNI
 Nomor KTP/Passport : 39.07.04.1949/1764/000 6505
 NPWP : *
 Alamat : JL. DAKSINAPATI TIMUR JAKARTA TIMUR 13220

Menyatakan bahwa :.....


Saya menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk :.....

a. Mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada :.....
 keberadaan dan kebenaran data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :.....
 - lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - lembaga pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;
 - badan usaha dan/atau perusahaan

b. Mengetahui dan memperoleh laporan setiap akhir tahun, termasuk namun tidak terbatas pada :.....
 data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada :.....
 - lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - lembaga pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;
 - badan usaha dan/atau perusahaan

yang dibuat atas nama bersama dengan Calon Penyelenggara Negara/Penyelenggara Negara/Mantan Penyelenggara Negara **) yang bernama : Ghassan Rahmندا

Demikian persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.....

Jakarta, 30 Nopember 2009
 Yang memberikan persetujuan,

 Amir Syarif

*) Surat persetujuan ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah
 **) Dini oleh pihak yang memiliki rekening bersama dengan Penyelenggara Negara
 ***) Cuci yang tidak perlu
 *****) Nama Penyelenggara Negara

Gambar 21. Lembar Surat Persetujuan Atas Rekening Bersama Form LHKPN Model KPK-A.

- Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan Hibah/Warisan/Hadiah berisi pernyataan penerimaan atau pemberian hibah/warisan/hadiah.

LHKPN MODEL KPK-A
Halaman ke 23 dari 23

XIII. SURAT PERNYATAAN TENTANG HARTA KEKAYAAN HIBAH / WARISAN / HADIAH

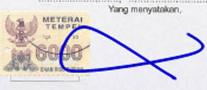
Nama : **DPS GHASSAN RAHMANDA**
 Jabatan / Lembaga : **ANGGOTA DPR RI PERODE 2009 - 2014**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas harta kekayaan yang saya terima / ~~berikan~~ berupa hibah / ~~warisan/hadiah~~ adalah sebagai berikut :

No.	Jenis dan Jumlah Harta Kekayaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Pemberi/Peroleha - Hibah/Warisan/Hadiah				Keterangan / Penjelasan
			Nama	Alamat Pada Waktu Itu	Hubungan dengan Penyelenggara Negara 1)	Tgl - Bln - Thn	
1	TAHAH SELUAS 6408 M2	4.000.000	SITI SHOLIKHAH	DR. WAHIDIN SEMARANG	1	13 11 1991	HIBAH DARI MERTUA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum.

Jakarta, 30 November 2009
Yang menyatakan,



METERAI 10.000

Nama jelas : **Ghassan Rahmanda**
 Nope/NIP/NRP/NRK : **110035860**

1) Hubungan dengan Penyelenggara Negara
 1. Orang tua / mertua
 2. Saudara Kandung atau saudara tiri/kami
 3. Anak kandung / tiri
 4. Orang lain

Merangan
 ampikan dokumen pendukung
 Lambaran ini dapat dipertanyak sesuai dengan kebutuhan
 Conit yang tidak perlu

v-13.2009

Gambar 22. Lembar Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan Hibah/Warisan/Hadiah Form LHKPN Model KPK-A.

D. FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B

Formulir LHKPN Model KPK-B adalah formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah mengisi Formulir LHKPN sebelumnya dan diwajibkan kembali untuk mengisi dikarenakan:

1. Mengalami perubahan jabatan (mutasi, promosi atau pensiun);
2. Dua tahun dalam jabatan yang sama sejak tanggal pelaporan sebelumnya;
3. Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

Muatan yang terdapat dalam Formulir LHKPN Model KPK-B sama dengan muatan yang terdapat pada Formulir LHKPN Model KPK-A, adapun **perbedaan mendasar** dengan Formulir LHKPN Model KPK-A adalah pada Model KPK-B terdapat **kolom jenis perubahan**. Kolom ini wajib diisi dengan menggunakan sistem pengkodean yang sudah ditentukan.

Prinsip perubahan yang dimaksud dalam formulir LHKPN Model KPK-B mencakup:

- Adanya **perubahan item** yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain);
- Adanya **penambahan item** dari laporan sebelumnya (item baru);
- Adanya **penghapusan item** dari laporan sebelumnya (dijual, dihibahkan, hilang, masalah hukum, dll).

Adapun jenis perubahan tersebut disampaikan dalam bentuk pengkodean sebagai berikut:

1. Kode Perubahan pada Data Pribadi dan Keluarga
 - 1.1 Data Pribadi:
 - 1) Perubahan Jabatan karena Mutasi;
 - 2) Perubahan Jabatan karena Promosi;
 - 3) Purnabakti;
 - 4) Perubahan Data Lainnya.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 1 Dari 22

I. DATA PRIBADI
I.1. DATA PRIBADI

Jenis Perubahan *)		1. Nama Lengkap : Drs. GHASSAN RAHMANDA
<input type="checkbox"/>		2. Nomor KTP : 32.03.16.2009/1274/2844053
		3. N P W P : 24.005.583.0-413.000
4. Agama		1. Islam 2. Kristen Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Lainnya :
5. Pendidikan Tertinggi		1. SD 2. SLTP 3. SLTA 4. SMD/3 5. S1/D4 6. S2/SP1 7. S3/SP2
6. Jabatan Saat Ini		
Nama Jabatan	
Unit Kerja	
Lembaga	
Nomor/Tgl SK Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan *)	 (tg/bn/thn)
Nomor/Tgl SK Petantikan	 (tg/bn/thn)

1) Jenis Perubahan : 1. Perubahan Jabatan Karena Mutasi 2. Perubahan Jabatan Karena Promosi 3. Purnabakti 4. Perubahan Data Lainnya
2) Lampirkan seluruh salinan dokumen yang mengahiasi perubahan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara :

Nama	Drs. GHASSAN RAHMANDA	Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
NHK	57575	Nama :
	Tanda Tangan	Jabatan :
		Tanggal :
		Tanda Tangan

v1.03.2011

Gambar 23. Lembar Data Pribadi Form LHKPN Model KPK-B.

1.2 Isteri/Suami:

- 1) Bertambah karena menikah lagi;
- 2) Berkurang karena cerai;
- 3) Berkurang karena meninggal dunia.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 3 Dari 22

II. DATA KELUARGA *)
II.1. DATA ISTRI / SUAMI

1: Bertambah karena menikah lagi.
2: Berkurang karena cerai.
3: Berkurang karena meninggal dunia.

No. Perubahan *)	Nama Istri / Suami (Dns - Fado)	Tanggal / Tanggal Lahir (Tgl - Bn - Thn)	Tanggal / Tanggal Nikah (Tgl - Bn - Thn)	Pekerjaan	Alamat Rumah
1	 KARTIKAWATI	DONGGALA 1 1 0 3 1 9 7 8	JAKARTA 2 8 0 8 2 0 1 1	DOSEN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	Jl. RT. [] RW. [] Kecamatan / Desa Kab / Kota Provinsi Negara Kode Pos [] [] [] [] No. Telepon

Keterangan :
*) Lengkapi (iv) dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

1) Jenis Perubahan :
1. Bertambah karena menikah lagi
2. Berkurang karena cerai
3. Berkurang karena meninggal dunia

2) Lengkapi seluruh salinan dokumen yang mengahiasi perubahan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara :

Nama	Drs. GHASSAN RAHMANDA	Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
NHK	25321	Nama :
	Tanda Tangan	Jabatan :
		Tanggal :
		Tanda Tangan

Drs. GHASSAN RAHMANDA

v1.03.2011

Gambar 24. Lembar Data Keluarga Form LHKPN Model KPK-B.

1.3 Anak:

- 1) Perubahan Data Anak;
- 2) Perubahan karena Anak Lahir;
- 3) Berkurang karena telah Mandiri/Meninggal.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 4 Dari 22

II. DATA KELUARGA

II.2. DATA ANAK YANG MENJADI TANGGUNGAN/YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN

No.	Jenis Pekerjaan	Nama dan Gelar (Kebiri/Status)	Tempat/Tanggal Lahir (Tgl - Bl - Thn)	Tempat/Tanggal Anak (Tgl - Bl - Thn)	Alamat (Rural)
1	2	NOVAL	BANDUNG	19 03 1994	III IVERSITAS INDONESIA

Anak yang tidak ditanggung oleh orang tua
 Anak yang ditanggung oleh orang tua

Anak yang meninggal
 Anak yang sudah mandiri
 Anak yang sudah menikah

Pembayaran denda oleh Penyelenggara Negara :
 Nama :
 No :

Ditema oleh Demografi Peradilan dan Penertasan LHKPN
 Nama :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Tanda Tangan :

Gambar 25. Lembar Data Anak yang Menjadi Tanggungan/ yang Tidak Menjadi Tanggungan Form LHKPN Model KPK-B.

2. Kode Perubahan pada Harta Tidak Bergerak

- 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
- 2) Penambahan data baru;
- 3) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual;
- 4) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan;
- 5) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena diwakafkan;
- 6) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum;
- 7) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam/ kerusakan.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 5 Dari 22

III. HARTA KEKAYAAN
III.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)¹⁾

No	Jenis Perubahan ²⁾	Lokasi / Alamat	Luas Tanah / No. Surat Tanah	Alas Nama / Hubungan Keluarga ³⁾	Asal Usul Kekayaan ⁴⁾	Saat Transaksi / Kejadian (Brg / brn / thr)	Nilai Perolehan / Nilai Jual	Nilai Saat Pelaporan (NUP x Luas tanah / Bangunan) ⁵⁾
1	1	DESA JARIT RT/RW 003/009 Kecamatan CAIDIPURO Kab./Kota LUMAJANG Provinsi JAWA TIMUR Negara INDONESIA Kode Pos 00000	6408 (m ²) Bangunan	SUSILOWATI	1	03.05.2010	Rp. 80.000.000	
2	1	DAKSHAPATI TIMOR RT/RW 003/009 Kecamatan PULO GADUNG Kab./Kota JAKARTA TIMUR Provinsi DKI JAKARTA Negara INDONESIA Kode Pos 12220	272 (m ²) Bangunan 254 (m ²)	SUSILOWATI SUSILOWATI	1 1	08.05.2006 08.05.2006	Rp. 636.474.000 Rp. 233.250.000	

Penghapusan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya Karena Dijual

Pembaharuan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya

Penghapusan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya Karena Dihibahkan

Pembaharuan data baru

Keterangan:
1) Lumbung Harta dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Lampiran adalah daftar dokumen yang melampirkan perubahan harta yang meliputi: Surat SPT PBB terakhir.
2) Jenis Perubahan:
1. Menambah data yang sebelumnya tidak tertera
2. Perubahan data yang
3. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena dijual
4. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena di hibahkan
5. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena masalah hukum
6. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena bencana alam
7. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena bencana alam / kerusakan
3) Hubungan Keluarga dengan Penyelenggara Negara:
1. Istri/Suami
2. Anak
3. Anak
4. Lain-lain
5) Asas Usul Kekayaan:
1. Hasil Sengketa
2. Uang Pinjam
3. Hasil
4. Hasil Sengketa dan Perdamaian
5. Hasil Sengketa dan Perdamaian
6. Lain-lain (dari)
7. Lain-lain (dari dan dan) dan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara:
Nama: **Drs. GHASSAN RAHMANDA**
NIK: **25321**

Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Nama:
Jabatan:
Tanggal:
Tanda Tangan:
Tanda Tangan: **Drs. GHASSAN RAHMANDA**

Gambar 26. Lembar Harta Tidak Bergerak Form LHKPN Model KPK-B.

3. Kode Perubahan pada Harta Bergerak dan Surat Berharga

- 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
- 2) Penambahan data baru;
- 3) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual;
- 4) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan;
- 5) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum;
- 6) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam / kerusakan.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 6 Dari 22

III.2 HARTA BERGERAK¹⁾
III.2.1. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA
Jenis Transportasi: 1. Kapal laut 2. Pesawat Udara 3. Mobil 4. Motor 5. Alat Transportasi Lainnya 6. Mesin Lain²⁾

No	Jenis Perubahan ²⁾	Jenis Transportasi	Alas Nama / Hubungan Keluarga ³⁾	Asal Usul Kekayaan ⁴⁾	No. polis / Merk / Model / Tahun pembuatan	Saat Transaksi / Kejadian (Brg / brn / thr)	Nilai Perolehan / Nilai Jual	Nilai Saat Pelaporan
1	1	5	Ghassan	1	KAWASAKI / JET SKI (DWT) 2003	10.12.2010	Rp. 85.000.000	
2	1	5	Ghassan	1	L 15 HAH / BMW / 750Li CB U (DWT) 2009	06.08.2011	Rp. 2.856.000.000	Rp. 2.470.000.000

Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan

Pembaharuan data baru

Keterangan:
1) Lumbung Harta dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Lampiran adalah daftar dokumen yang melampirkan perubahan harta yang meliputi: Surat SPT PBB terakhir.
2) Jenis Perubahan:
1. Menambah data yang sebelumnya tidak tertera
2. Perubahan data yang
3. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena dijual
4. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena di hibahkan
5. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena masalah hukum
6. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena bencana alam
7. Penghapusan data yang di laporkan sebelumnya karena bencana alam / kerusakan
3) Hubungan Keluarga dengan Penyelenggara Negara:
1. Istri/Suami
2. Anak
3. Anak
4. Lain-lain
4) Asas Usul Kekayaan:
1. Hasil Sengketa
2. Uang Pinjam
3. Hasil
4. Hasil Sengketa dan Perdamaian
5. Hasil Sengketa dan Perdamaian
6. Lain-lain (dari)
7. Lain-lain (dari dan dan) dan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara:
Nama: **Drs. GHASSAN RAHMANDA**
NIK: **25321**

Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Nama:
Jabatan:
Tanggal:
Tanda Tangan:
Tanda Tangan: **Drs. GHASSAN RAHMANDA**

Gambar 27. Lembar Harta Bergerak Form LHKPN Model KPK-B.

4. Kode Perubahan pada Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya
 - 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
 - 2) Pembukaan rekening baru;
 - 3) Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dikonsumsi;
 - 4) Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan;
 - 5) Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum;
 - 6) Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam / kerusuhan.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 10 Dari 22

III.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA *)
Kode Jenis : 1. Uang Tunai 2. Deposito 3. Giro 4. Tabungan 5. Setara Kas Lainnya

No	Jenis Penyesuaian	Kode Jenis	Negara	Rekening	Nama Pemilik Rekening	Agensi Keuangan	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Saldo Awal (USD)	Saldo Akhir (USD)
1	1	1	INDONESIA	1	GHASSAN	1		85.500.000	21.000	
2	3	4	INDONESIA	2	GHASSAN	1	PERMATA	1.990.323.450.000	0	
3	1	4	INDONESIA	2	SUSILOWATI	1	BN	1.995.001.808.800	100.110.689	
3	2	4	INDONESIA	2	NOUVAL	1	BN	2.010.001.708.500	5.038.451	

(Note: The table above is a simplified representation of the data visible in the image. The actual image contains more detailed information and a signature.)

Gambar 28. Lembar Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya Form LHKPN Model KPK-B.

5. Kode Perubahan pada Piutang / Hutang
 - 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
 - 2) Penambahan piutang / hutang baru;
 - 3) Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena sudah lunas;
 - 4) Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 11 Dari 22


III.5. PIUTANG *)

No	Jenis Perubahan ¹⁾	Nama Club/Lu	Bentuk Piutang ²⁾	Tanggal Transaksi (Tj - Bn - Thn)	Tanggal jatuh tempo (Tj - Bn - Thn)	Bentuk Agunan yang didonasikan	Nilai Piutang Saat Pelaporan ³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<input type="checkbox"/>	ASURANSI PENDIDIKAN A. N. T. HALISAH	1	12 12 2008	12 12 2015		Rp. 12.000.000
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$

Keterangan :
 *) Jenis Perubahan :
 1. Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena sudah lunas;
 2. Penambahan piutang baru;
 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum;
 4. Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum.

2) Bentuk Piutang :
 1. Pinjaman
 2. Pinjaman lunak

3) Nilai Piutang saat laporan :

Paraf dan Nama :  Tanda Tangan

Diproses Oleh Direktur, Pendidikan dan Penertiban LHKPN

Gambar 29.1. Lembar Piutang Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 12 Dari 22


III.6. HUTANG *)

No	Jenis Perubahan ¹⁾	Nama Kreditor	Bentuk Hutang ²⁾	Saat Transaksi (Tj - Bn - Thn)	Tanggal jatuh tempo (Tj - Bn - Thn)	Bentuk Agunan yang didonasikan/No. Kartu Kredit	Nilai Hutang Saat Pelaporan ³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	WALIA CIPTA SEJAHTERA	1	11 08 2009	18 10 2010	APARTEMEN TALUBATA PESTIDEICE	Rp. 0
2	3	BCA	2		29 11 2009	3215433654734XXX	Rp. 0
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$
	<input type="checkbox"/>						Rp.
	<input type="checkbox"/>						US\$

Keterangan :
 *) Jenis Perubahan :
 1. Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena sudah lunas;
 2. Penambahan hutang baru;
 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum;
 4. Penutupan rekening atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum.

2) Bentuk Hutang :
 1. Utang
 2. Kartu Kredit
 3. Pinjaman

3) Nilai Hutang saat laporan :

Paraf dan Nama :  Tanda Tangan

Diproses Oleh Direktur, Pendidikan dan Penertiban LHKPN

Gambar 29.2. Lembar Hutang Form LHKPN Model KPK-B.

6. Kode Perubahan pada Penghasilan
 - 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
 - 2) Penambahan Penghasilan / Profesi Baru;
 - 3) Penghapusan Penghasilan / Profesi.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 13 Dari 22

IV. PENGHASILAN PENYELENGGARA NEGARA *)							
IV.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER BULAN)							
No	Jenis Perubahan ¹⁾	Nama Lembaga/ Perusahaan	Gaji (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Lain/Honorarium (Rp)	Potongan-potongan (Rp)	Pendapatan Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6) - (7)
	1	DPR RI	18.800.000		32.500.000	3.008.706	48.291.294
	1	MPR RI		12.500.000	15.000.000		27.500.000

IV.2. PENGHASILAN DARI KEKAYAAN YANG DIMILIKI (PER TAHUN)

Jenis Penghasilan : 1. Sewa 2. Bunga Bank 3. Bunga Obligasi 4. Deviden 5. Jasa Giro 6. Surat Berharga Lainnya 7. Hasil Penjualan Produksi 8. Penghasilan Lain-lain

No	Jenis Perubahan ¹⁾	Jenis Penghasilan	Nama Harta Kekayaan Yang Menimbulkan Penghasilan (ill.1. s/d VI.)	Nama Perusahaan/Bank	Total Penghasilan Bersih
1	2	3	4	5	6
	1	4	1. SURAT BERHARGA	1. SAHAB.	Rp. 162.000.000
	1	8	1. BUKU	1. BUKU PESOWA	Rp. 50.000.000
	1	7	1. SUSU SAPI	1. PERORANGAN	Rp. 75.000.000

Keterangan :
*) Lemberan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara :

Nama :
NHNK :

Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Tanda Tangan

Tanda Tangan

lanca lanca

v1.03.2011

Gambar 30.1. Lembar Penghasilan Penyelenggara Negara Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 14 Dari 22

IV.3. PENGHASILAN DARI PROFESI/KEAHLIAN (PER TAHUN) *)				
Jenis Penghasilan : 1. Jasa Profesi 2. Keahlian Lainnya 3. Pensiunan dan Jabatan Lain				
No	Jenis Perubahan ¹⁾	Jenis Penghasilan	Nama Perusahaan/Badan Hukum/Perorangan	Total Penghasilan Bersih
1	2	3	4	5
	1	1	UNIVERSITAS TRI SULA	Rp. 10.000.000
	1	1		Rp.
	1	1		Rp.
	1	1		Rp.
	1	1		Rp.

Keterangan :
*) Lemberan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara :

Nama :
NHNK :

Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Nama :
Jabatan :
Tanggal :

Tanda Tangan

Tanda Tangan

lanca lanca

v1.03.2011

Gambar 30.2. Lembar Penghasilan dari Profesi Form LHKPN Model KPK-B.

7. Kode Perubahan pada Pengeluaran
- 1) Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya;
 - 2) Penambahan pengeluaran baru;
 - 3) Penghapusan data pengeluaran yang dilaporkan sebelumnya.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 16 Dari 22

VI. PENGELUARAN *)

Jenis perubahan ¹⁾	Nama Pengeluaran	Jenis Pengeluaran		Pengeluaran Per Tahun ²⁾
1	2	3	4	5
[1]	1. Konsumsi Rumah Tangga	1. PAM	3. LISTRIK	Rp. 108.000.000
[1]	2. Transportasi	2. TELEPON	4. PANGSANG	US\$ 150.000.000
[1]	3. Pendidikan	1. BBM	3. GANTI SPARE PART	Rp. 25.000.000
[1]	4. Kesehatan	2. GANTI OIL	4. SERVEVE KENDARAAN	US\$ 3.600.000
[1]	5. Rekreasi	1. SD	3. OBAT	Rp. 134.400.000
[1]	6. PPh Pribadi	2. KE LUAR NEGERI	3. KE LUAR NEGERI	US\$
[1]	7. Pajak Lainnya	1. KENDARAAN BERMOTOR	3. DUL	Rp. 12.000.000
[1]	8. Pengeluaran Lainnya - Rutin	2. PBB	3. MEMBERSHIP OLAHRAGA	US\$ 438.600.000
[1]	9. Pengeluaran Lainnya - Non Rutin	1. PREMI ASURANSI SEWA RUKO	3. CICILAN APARTMENT	Rp. 438.600.000
		2. ZISWAF, BANTUAN SOSIAL	4. ZISWAF, BANTUAN SOSIAL	US\$

Keterangan :
*) Lembaran ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

Perubahan dibuat oleh Penyelenggara Negara :

Nama :
NHN :

Diproses Oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Nama :
Jabatan :
Tanggal :
Tanda Tangan :

tanda tangan

V.03.2011

Gambar 31. Lembar Pengeluaran Form LHKPN Model KPK-B.

8. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa
- 1) Surat Pernyataan berisi pernyataan kebenaran informasi yang diberikan oleh Wajib LHKPN terhadap isian Formulir LHKPN.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 17 Dari 22

VII. SURAT PERNYATAAN *)


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. GIASSAL RAIMALDA**
Tempat, Tanggal Lahir : **MATARAM, 16/08/1968**
Informasi Penerima : **ALIGOTA DER PU PERIOD 2009 - 2014**
No. KTP-Pasport : **3203.16.2009/1274/244053**
NPWP : **24005.5830-813.000**
Alamat : **JL. DALISNAPATI TIMUR JALAPATA TIMUR 13220**

Menyatakan bahwa:

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tertera dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, saya buat dengan sadar, jujur, dan sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan berdasarkan data, statistik, dan catatan yang akurat. Catatan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Adhikar Penyelenggara Negara ***) sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang jujur dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Negara yang jujur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, atau tanggung saya tidak saya laporkan sebagai Catatan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Adhikar Penyelenggara Negara ***) dengan ini saya menyangkal.
3. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, atau tanggung saya tidak saya laporkan sebagai Catatan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Adhikar Penyelenggara Negara ***) dengan ini saya menyangkal.
4. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, atau tanggung saya tidak saya laporkan sebagai Catatan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Adhikar Penyelenggara Negara ***) dengan ini saya menyangkal.
5. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, atau tanggung saya tidak saya laporkan sebagai Catatan Penyelenggara Negara Penyelenggara Negara Adhikar Penyelenggara Negara ***) dengan ini saya menyangkal.

Diketahui dan pernyataan ini dibuat dan ditandatangani, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan maupun pemaksaan dalam bentuk apapun oleh saya sendiri.

Jakarta, 29 Desember 2011
Yang Menyatakan,

Giassal Raimalda
10035860

*) Lembaran ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
**) Untuk surat kuasa tidak dapat dibuat
***) Coret yang tidak perlu.

V.03.2011

Gambar 32. Lembar Surat Pernyataan Form LHKPN Model KPK-B.

- 2) Surat Kuasa Mengumumkan berisi pemberian kuasa dari Wajib LHKPN kepada KPK untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

VIII. SURAT KUASA
MENGUMUMKAN HARTA KEKAYAAN *)

Yang berwenang diangkat di bawah ini:

Nama : Dwi-GHASSAN RAHMINDA
Tempat/tgl lahir : MATARAM, 16/08/1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP/Paspor : ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009-2014
NPWP : 320316200912742044053
Alamat : 24.005.583.0-413.000
Jl. DAI SHAFATI TIMI R JAJA RTA TIMI R 13 220

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di bawah nama yang dikuasakan oleh Penerima Kuasa.

Seluruhnya dengan ini Penerima Kuasa seraya mengabdikan dan mengalihkan hak-hak-hak Penerima Kuasa dan Pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, termasuk hak-hak, hak-hak yang diwariskan, dan lain-lain yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa secara penuh dan sempurna kepada Penerima Kuasa untuk diumumkan dan mengumumkan yang berhak. Apabila untuk suatu perbuatan hukum tertentu diperlukan kuasa khusus, hal ini dianggap telah tercantum di dalam ayat.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun termasuk apabila ada-bah yang diatur dalam Pasal 1815, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa menandatangani surat kuasa khusus yang dibuat di bawah pengawasan dan kehadiran pejabat kehakimatan yang berwenang di bawah Penerima Kuasa.

Jakarta, 29 Desember 2011

Ghassan Rahminda
110035860

*) Lengkapnya ini dapat dipersempit sesuai dengan ketentuan Peraturan surat kuasa ini tidak dapat diubah

Gambar 33. Lembar Surat Kuasa Mengumumkan Form LHKPN Model KPK-B.

- 3) Surat Kuasa dan Lampiran Surat Kuasa berisi pemberian kuasa dari Penyelenggara Negara, isteri/suami dan anak dalam tanggungan kepada KPK. Lampiran Surat Kuasa merupakan satu kesatuan dengan Surat Kuasa.

IX. SURAT KUASA *)

Yang berwenang diangkat di bawah ini:

Nama : Dwi-GHASSAN RAHMINDA
Tempat/tgl lahir : MATARAM, 16/08/1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. KTP/Paspor : ANGGOTA DPR RI PERIODE 2009-2014
NPWP : 320316200912742044053
Alamat : 24.005.583.0-413.000
Jl. DAI SHAFATI TIMI R JAJA RTA TIMI R 13 220

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

a. Mengajukan, menyetujui, menyetujui, dan mengalihkan, secara penuh dan sempurna kepada Penerima Kuasa yang berwenang untuk:

- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:
- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:
- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:

b. Mengajukan dan menyerahkan secara penuh dan sempurna, termasuk hak-hak-hak yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:

- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:
- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:
- Memberikan dan menyerahkan data kekayaan Pemberi Kuasa yang berwenang untuk:

Seluruhnya dengan ini Penerima Kuasa seraya mengabdikan dan mengalihkan hak-hak-hak Pemberi Kuasa dan Pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, termasuk hak-hak, hak-hak yang diwariskan, dan lain-lain yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa secara penuh dan sempurna kepada Penerima Kuasa untuk diumumkan dan mengumumkan yang berhak. Apabila untuk suatu perbuatan hukum tertentu diperlukan kuasa khusus, hal ini dianggap telah tercantum di dalam ayat.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun termasuk apabila ada-bah yang diatur dalam Pasal 1814, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa menandatangani surat kuasa khusus yang dibuat di bawah pengawasan dan kehadiran pejabat kehakimatan yang berwenang di bawah Penerima Kuasa.

Jakarta, 29 Desember 2011

Ghassan Rahminda

*) Lengkapnya ini dapat dipersempit sesuai dengan ketentuan Peraturan surat kuasa ini tidak dapat diubah

Gambar 34.1. Lembar Surat Kuasa PN Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 20 Dari 22

X. LAMPIRAN SURAT KUASA *)

NO.	NAMA BANK/LEMBAGA NON BANK LAIN-LAIN	NO. REKENING/NO. SAHAM/NO. POLIS ASURANSI LAIN-LAIN	KETERANGAN
1	BANK NIAGA	080-01-23535-44-4	
2	HSBC REKSADANA	050-002146-222	
3	MANDIRI SEKURITAS PT.	CC001-B001-003-33	

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Kuasa tertanggal

Jakarta, 29 Desember 2011
 METRIKA
 TEMPEL
 5000
 Ghassan Rahminda
 110035860

*) Form Lampiran Surat kuasa dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 34.2. Lembar Lampiran Surat Kuasa PN Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 18 Dari 22

IX. SURAT KUASA *)

Yang berkekuasaan di bawah ini:

Nama: LARTI AWATI
 Tanggal lahir: 08 AGOSTUS 1978
 Jabatan: DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SILANG
 No. KTP/Pasport: ...
 NPWP: ...
 Alamat: JL. DALSINHAPATI TIMUR JALAN PTA TIMUR 1322B

Isi suratnya dibuat sebagai: "Pemberi Kuasa"

Dengan ini member kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang berkekuasaan penuh secara eksklusif sebagai "Penerima Kuasa".

K H U S U S

Cukup dan sah serta Pemberi Kuasa:

a. Mengetahui, menyetujui, menyetujui, dan menandatangani, sebagai tanda bukti terdapat pada:
 - Keabsahan dan kelengkapan data dokumen Pemberi Kuasa yang berkekuasaan penuh;
 - Keabsahan dan kelengkapan data dokumen Penerima Kuasa yang berkekuasaan penuh;

b. Mengetahui dan menyetujui sebagai tanda bukti terdapat pada:
 - Keabsahan dan kelengkapan data dokumen Pemberi Kuasa yang berkekuasaan penuh;
 - Keabsahan dan kelengkapan data dokumen Penerima Kuasa yang berkekuasaan penuh;

Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Kuasa tertanggal

Jakarta, 29 Desember 2011
 METRIKA
 TEMPEL
 5000
 KARTIKAWATI

*) Dokumen ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
 Dokumen surat kuasa ini tidak dapat dihapus.

Gambar 34.3. Lembar Surat Kuasa isteri/suami PN Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 20 Dari 22

X. LAMPIRAN SURAT KUASA *)

NO.	NAMA BANK/LEMBAGA NON BANK/ LAIN-LAIN	NO. REKENING/NO. SAHAM/NO. POLIS ASURANSI/LAIN-LAIN	KETERANGAN
1	BRI	00056671XXX	

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Kuasa tertanggal

Jakarta, 29 Desember 2011
 TEMPEL
 5000
 KARTIKAWATI

*) Form Lampiran Surat kuasa dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
11/10/2011

Gambar 34.4. Lembar Lampiran Surat Kuasa isteri/suami PN Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 18 Dari 22

IX. SURAT KUASA *)

Yang bersebut dengan di bawah ini:

Nama: NOVAL
 Tempat/tgl lahir: BANDI No: 1000014994
 Jenis/Pekerjaan:
 No KTP/Pasport:
 NPWP:
 Alamat: JL. DALSUHAPATI TIMOR JAYA RTA TIMOR, 13 220

(sebelumnya disebut sebagai "Pembeli Kuasa")

Dengan ini, membuat kuasa dengan hak substitusi kepada

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, yang berinisiatif baik secara langsung maupun melalui surat melalui surat yang ditandatangani "Perantara Kuasa" :

K H U S U S

a. Mengetahui, menyetujui, menyetujui, dan menandatangani, termasuk nama, fisik refotografasi :
 keberanian dan kelengkapan data dokumen Pembeli Kuasa yang benar-benar
 - Lembar Kuasa yang ditandatangani dengan tanda tangan
 - Lembar Kuasa yang ditandatangani dengan efek, termasuk pernyataan, tidak ada sengketa penyelesaian
 b. Mengetahui dan menyetujui secara resmi dan jujur, termasuk nama, fisik refotografasi :
 data dokumen Pembeli Kuasa yang benar-benar
 - Lembar Kuasa yang ditandatangani dengan efek, termasuk pernyataan, tidak ada sengketa penyelesaian
 - Lembar Kuasa yang ditandatangani dengan efek, termasuk pernyataan, tidak ada sengketa penyelesaian

Sebelumnya dengan ini Pembeli Kuasa berwenang mengeluarkan kuasa kepada anak-anak yang ditandatangani pada tanggal ditandatangani dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada lembaran ini yang ditujukan untuk melakukan kegiatan di instansi dan instansi lainnya yang berwenang dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila untuk pembelian barang tertentu diperlukan kuasa khusus, hal ini dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kecuali dengan alasan yang tertera dalam Pasal 1413, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pembeli Kuasa menandatangani surat dengan bentuk dan isi yang tertera pada lembaran ini.

Jakarta, 29 Desember 2011
 TEMPEL
 5000
 NOVAL

*) Lembaran ini dapat dipertahankan sesuai dengan ketentuan
 Pasal 2, surat kuasa ini tidak dapat dicabut

Gambar 34.5. Lembar Surat Kuasa Anak Form LHKPN Model KPK-B.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 20 Dari 22

X. LAMPIRAN SURAT KUASA *)

NO.	NAMA BANK/LEMBAGA NON BANK/ LAIN-LAIN	NO. REKENING/NO. SAHAM/NO. POLIS ASURANSI/LAIN-LAIN	KETERANGAN
1	BNI	00 17085XXX	

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Surat Kuasa tertanggal:

Jakarta, 29 Desember 2011

METERAI
TEMPER
Detik Kuasa
[Signature]
NOUVAL

*) Form Lampiran Surat kuasa dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

v1.03.2011

Gambar 34.6. Lembar Lampiran Surat Kuasa Anak Form LHKPN Model KPK-B.

- 4) Surat Persetujuan atas Rekening Bersama berisi persetujuan dari pihak yang memiliki rekening bersama dengan Penyelenggara Negara.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 21 Dari 22

**XI. SURAT PERSETUJUAN ATAS REKENING BERSAMA
(JOINT ACCOUNT) *)**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama **) : Amir Syarif
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 7 April 1949
Jabatan/Pekerjaan : Pensiunan TNI
Nomor KTP/Passport : 38.07.04.1949/1764/0006506
NPWP :
Alamat : Jl. Daksinapati Timur Jakarta Timur 13220

Menyatakan bahwa:

Saya menyetujui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk:

a. Mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- lembaga/pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;
- badan usaha dan/atau perusahaan

b. Mengetahui dan memperoleh laporan setiap akhir tahun, termasuk namun tidak terbatas pada:

- lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- lembaga/pihak/profesi yang terkait dengan efek; instansi pemerintah;
- badan usaha dan/atau perusahaan

yang dibuat atas nama bersama dengan Calon Penyelenggara Negara/Penyelenggara Negara/Mantan Penyelenggara Negara***) yang bernama: Ghassan Rahmanda

Demikian persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

20.....

Yang memberikan persetujuan,
[Signature]
Amir Syarif

*) Surat persetujuan ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah
**) Diisi oleh pihak yang memiliki rekening bersama dengan Penyelenggara Negara
***) Coret yang tidak perlu
****) Nama Penyelenggara Negara

v1.03.2011

Gambar 35. Lembar Persetujuan atas Rekening Bersama Form LHKPN Model KPK-B.

- 5) Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan Hibah/Warisan/Hadiah berisi pernyataan penerimaan atau pemberian hibah/warisan/hadiah.

LHKPN MODEL KPK-B
Halaman ke 22 Dari 22

XII. SURAT PERNYATAAN TENTANG HARTA KEKAYAAN HIBAH/WARISAN/HADIAH *)

Nama : **DRS GHASSAN RAHMADA**
 Jabatan/Lembaga : **ANGGOTA DPR RI PERODE 2009 - 2014**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas harta kekayaan yang saya terima/berikan **) berupa hibah/warisan/hadiah **) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Perubahan ¹⁾	Jenis dan Jumlah Harta Kekayaan	Nilai Perolehan (Rp)	Pemberi/Penerima Hibah/Warisan/hadiah **)			Tgl - Bln - Thn	Penjelasan Pemberian/Penerimaan Hibah/Warisan/Hadiah *)
				Nama	Alamat Pada Waktu Itu	Hubungan dengan Penyelenggara Negara ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	TAHAH SELUJAS 6408 M2	4.000.000	SITI SHOLIHAH	Jl. DR. WAHIDIN SEMARANG	1	13 11 1991	HIBAH DARI MERTUA

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

Jakarta, 30 Desember 2009
Yang menyatakan

(Signature)

Nama : **Ghassan Rahmada**
 NIP/PIN/NIK/NIKEM : **110835848**

V1.03.2011

Keterangan :
 *) Lengkapi Dokumen Pendukung
 **) Lengkapi dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
 ***) Coret yang tidak perlu

1) Jenis Perubahan :
 1. Perubahan Surat Pernyataan tentang Hibah/Warisan/Hadiah
 2. Perubahan Surat Pernyataan tentang Hibah/Warisan/Hadiah
 3. Pengurangan Surat Pernyataan tentang Hibah/Warisan/Hadiah
 4. Penghapusan Surat Pernyataan tentang Hibah/Warisan/Hadiah

2) Hubungan keluarga dengan :
 1. Orang Tua/Mertua
 2. Saudara Kandung Istri/Suami *)
 3. Anak Kandung/Tiri
 4. Orang lain

Gambar 36. Lembar Surat Pernyataan Tentang Harta Kekayaan Hibah/Warisan/Hibah Form LHKPN Model KPK-B.

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan,
Jakarta Selatan 12920
Telepon : 021 - 2557 8396 / 8334 / 8335
SMS : 021 - 71 575 575
Fax : 021 - 5292 1230
Email : pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id